

PATOLOGI BIROKRASI DALAM PROMOSI PEGAWAI DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Ria Laurina Tumbelaka¹
Sarah Sambiran²
Neni Kumayas³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana patologi birokrasi dalam promosi pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya Patologi Birokrasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa, yakni perilaku negatif atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam pelaksanaan promosi pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan syarat jabatan dan aturan-aturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan prinsip merit sistem dan prinsip the right man on the right place apabila dilihat dari latar belakang pendidikan dan golongan kepangkatan. Kedepannya, untuk dapat memperoleh pegawai yang memiliki kualitas baik yang dapat mendukung kinerja birokrasi sehingga lebih optimal dimasa mendatang, maka dalam promosi pegawai perlu mengedepankan aspek profesionalitas yang dicerminkan dengan penerapan pendekatan kompetensi, latar belakang pendidikan, prestasi kerja serta golongan kepangkatan dalam promosi pegawai. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, maka promosi pegawai akan terhindar dari Patologi Birokrasi.

Kata Kunci :Patologi Birokrasi, Promosi.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Birokrasi merupakan instrumen penting dimana kehadirannya tak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Birokrasi adalah sebuah organisasi formal yang terdiri dari sekelompok pejabat yang bekerja sama secara ketat dan tidak boleh sedikit pun menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku dan merupakan status jabatan yang terkait dengan sumpah kesetiaan, kerahasiaan dan kejujuran untuk mengabdikan pada bangsa dan negara. Birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada ditingkat atas. Pada rantai komando ini setiap posisi dan tanggung jawab dideskripsikan dalam organisasi.

Dalam kehidupan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, birokrasi merupakan mesin negara yang mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting. Karena tanpa birokrasi negara tidak mungkin ada. Peran birokrasi ibarat sebuah kaca bagi negara, artinya jika birokrasi baik maka negara dan masyarakatnya pun akan baik, tapi jika birokrasi tidak baik maka negara dan masyarakatnya pun juga tidak baik. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang dapat menjalankan tugasnya sejalan dengan tujuan pemerintahan guna tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional.

Berdasarkan perkembangannya, istilah birokrasi kemudian selalu dikaitkan dengan institusi atau organisasi pemerintah. Pemahaman ini cenderung berkembang hampir di setiap negara, khususnya negara-negara berkembang. Pemahaman birokrasi sebagai organisasi pemerintah semakin dipertegas dengan dilekatkannya

kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada birokrat. Dalam perjalanan bangsa Indonesia birokrasi tidak bisa dilepaskan dalam sistem pemerintahan. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pemerintah dan melaksanakan keputusan kebijakan pemerintah.

Keberadaan birokrasi sampai saat ini masih membawa polemik yang berkepanjangan. Tuntutan reformasi setidaknya telah merubah wajah birokrasi Indonesia meskipun belum terlalu signifikan. Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan sering memberikan kesan yang tidak baik pada masyarakat. Hal ini berakibat birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri. Birokrasi tidak dapat lagi menempatkan diri sebagai sosok institusi yang berwibawa dan tak tersentuh oleh kritik dari pihak luar birokrasi. Dalam situasi yang demikian, birokrasi aparatur negara harus benar-benar bertindak demi kepentingan bangsa dan negara dan agar dalam menjalankan fungsinya, birokrasi dapat selalu berpegang pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan standar ideal birokrasi dan jika dibandingkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan saat ini, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Apabila dilihat dari kenyataan sehari-hari yang senantiasa kita alami di lingkungan birokrasi pemerintahan, tak dapat dipungkiri bahwa tidak ada birokrasi yang betul-betul bebas dari berbagai "penyakit birokrasi" atau yang sering disebut sebagai patologi birokrasi yang tentunya sangat bervariasi dan dirasakan sangat sulit untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Oleh karena itu,

pendeteksian penyakit birokrasi harus dilakukan sedini mungkin, agar penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh birokrasi di Indonesia tidak menular ke yang lainnya sebagai upaya preventif bahkan lebih dari itu dapat disembuhkan secara total meskipun membutuhkan waktu yang lama. Hal ini adalah sebagai suatu tantangan dan sekaligus merupakan tuntutan bagi birokrasi pemerintah kedepan.

Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi terjadi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian yang pada dasarnya bersumber dari rekrutmen dan promosi pegawai. Di dalam mempertahankan dan meningkatkan produktivitas suatu organisasi pemerintahan, tentunya peran manajemen sumber daya manusia sangatlah penting agar tenaga kerja mau dan mampu memberikan prestasi kerjanya sebaik mungkin. Dalam hal tersebut organisasi pemerintahan berkewajiban memperhatikan kebutuhan pegawainya baik bersifat meteril maupun non materil. Wujud dari perhatian, usaha serta dorongan yang dapat dilakukan oleh organisasi pemerintahan terhadap pegawainya, salah satunya adalah dengan melaksanakan promosi jabatan yang objektif dan adil serta penempatan kerja yang tepat. Pelaksanaan promosi jabatan dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawainya agar mau bekerja dengan perilaku kerja yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh organisasi pemerintahan guna meningkatkan produktivitas kerja dan menjamin keberhasilan organisasi tersebut di dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Orang-orang yang bekerja dalam birokrasi pemerintahan harus bekerja secara profesional. Oleh karena itu, keterlibatan birokrasi dalam politik dianggap sebagai hal yang harus

disingkapi lebih serius, karena birokrasi bukanlah institusi atau lembaga yang bisa mewakilkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Secara makro atau nasional, persoalan birokrasi di Indonesia lebih di dominasi karena kurangnya pemisahan atau segregasi yang jelas antara kepentingan politik dan administrasi. Masih sering dijumpai birokrat terlibat secara aktif dalam kegiatan politik dan juga adanya politisi yang selalu mendominasi proses-proses birokrasi sehingga kebijakan yang diambil dalam birokrasi merupakan kebijakan politik dari orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Reformasi birokrasi di Indonesia masih terus bergulir, namun sampai saat ini belum ada regulasi (peraturan) yang menjamin depolitisasi birokrasi secara substansial. Persoalannya apabila model birokrasi yang seperti itu terus dijalankan, maka ke depan akan memunculkan konflik terutama dapat mengakibatkan terjadinya patologi birokrasi.

Tinjauan Pustaka

Menurut (Said, 2010:1) istilah birokrasi berasal dari bahasa Perancis "bureau" yang berarti kantor atau meja tulis; dan dari bahasa Yunani "crates" yang berarti mengatur. Selanjutnya Ernawan (Dalam Delly Mustafa, 2014:1) mengatakan bahwa pada mulanya istilah birokrasi ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematisasi kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Sesuai dengan perkembangannya, istilah birokrasi pada dasarnya dapat disamakan dengan kegiatan-kegiatan administrasi, oleh karena apa yang dijalankan dalam suatu birokrasi itu juga yang dijalankan dalam suatu kegiatan administrasi yang merupakan suatu rangkaian kerja yang diperintah

oleh seseorang (atasan) kepada orang lain (bawahan) pada suatu kantor.

Pengertian birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Menurut Peter A. Blau dan Charles H. Page (Dalam Albrow Martin, 2009:12) mengatakan bahwa birokrasi adalah suatu tipe dari organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematis pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Lepawski (Dalam Delly Mustafa, 2014:4) mengemukakan dalam pandangannya bahwa birokrasi merupakan sentral dari penyelenggaraan administrasi negara yang sedang mengemban fungsi dan peran kunci dalam masyarakat modern.

Pada setiap negara di dunia ini pelaksanaan birokrasi tidaklah sama antar negara satu dengan negara lain, perbedaan ini sangat tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan permintaan masyarakat. Dalam beberapa sebutan/istilah, birokrasi sendiri diterjemahkan sebagai pemerintah yang anggota-anggotanya disebut aparat birokrasi atau birokrat.

Menurut Thoha (2008:15) menegaskan bahwa birokrasi merupakan suatu sistem untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan efektif. Di Indonesia jika ada bahasan tentang birokrasi, maka persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Birokrasi dengan segala macam cacatnya atau birokrasi yang memiliki patologi menjadi milik pemerintah. Birokrasi pemerintahan diartikan sebagai officialdom atau kerajaan

pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area official yang yurisdiktif.

Menurut Rourke (Dalam Thoha, 2014:12) mendefinisikan bahwa Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (written procedures), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

Rod. Haque (Dalam Delly Mustafa, 2014:11) menegaskan bahwa birokrasi adalah institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas negara. Dalam institusi pemerintahan ini konsep birokrasi dimaknai sebagai

proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. Proses pengelolaan negara membutuhkan sosok birokrat yang memiliki keterampilan, pengalaman dan keahlian.

Selanjutnya, Peter (Dalam Delly Mustafa 2014:5) mengatakan bahwa keberadaan birokrasi mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu negara, sehingga dapat dikatakan eksistensi birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintah) untuk mensejahterakan masyarakat. Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat, hal inilah yang disebut dengan istilah "birokrasi". Dan atas pemahaman

ini pulalah sehingga birokrasi tidak bisa lepas dari negara.

Promosi merupakan salah satu langkah dari proses manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Promosi jabatan berperan penting dalam memajukan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Seseorang yang dipromosikan menduduki sebuah jabatan harus mempertimbangkan aspek *the right man on the right place* (menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat). Menurut Siagian (2009:169) Promosi jabatan adalah perpindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi serta diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya.

Senada dengan Siagian, Rivai (Dalam Kadarisman 2013:134) mengemukakan bahwa promosi terjadi apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dari pembayaran, tanggung jawab, dan atau level. Umumnya diberikan sebagai penghargaan, hadiah (*reward system*) atas usaha dan prestasinya di masa depan. Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong pegawai untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan kerjanya. Menurut Hasibuan (2016:108) promosi jabatan adalah perpindahan yang memperbesar wewenang (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*) pegawai ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban hak, status dan penghasilannya semakin besar.

Metode Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka harus ada keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berpikir tertata pada

suatu jalur yang baik. Untuk itu dibutuhkan suatu metodologi. Menurut Silalahi (2012:12), menjelaskan bahwa metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sebagai penelitian lapangan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah (Winarno Surakhmad, 2010:141). Penelitian ini menggunakan prosedur deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Maksud dari pernyataan ini bahwa setelah data yang dicari peneliti sudah diperoleh, maka data tersebut diolah dengan cara menjelaskan atau menggambarkan (mendeskripsikan) sesuai dengan hasil yang diperoleh saat penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah patologi dalam promosi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menduduki jabatan struktural tertentu. Fokus penelitian tersebut diamati dari obyektivitas dalam melakukan promosi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan prinsip merit system dan prinsip *the right man on the right place*.

Adapun informan dalam penelitian ini diambil dari pejabat struktural dan pegawai / staf pelaksana di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa, yang terdiri dari :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa

2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa
3. Kepala Bidang Mutasi Pegawai
4. Kepala Sub Bagian Informasi Kepegawaian
5. Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa

Hasil Penelitian

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam setiap kegiatan organisasi, karena bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan tanpa didukung oleh manusia sebagai pelaksana kegiatan operasionalnya maka tidak akan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan tingkat efisiensi yang diharapkan.

Faktor penting dalam pengelolaan aparatur pemerintahan adalah dalam proses penempatan dan promosi pegawai. Promosi pegawai harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan berdasarkan pada prinsip Merit System. Prinsip Merit System adalah kebijakan dan Manajemen Sumber Daya Manusia aparatur negara yang berdasarkan jenjang karir dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, latar belakang pendidikan, serta kinerja secara adil dan wajar. Adil dan wajar berarti tanpa membedakan latar belakang politik, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur maupun kondisi fisik lainnya.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan promosi pegawai harus mampu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat (*the right man on the right place*) artinya menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan keterampilannya. Hal ini bertujuan agar kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang sesuai dengan tuntutan tugas atau jabatan yang ada, sehingga sumber daya manusia yang ada akan menjadi produktif dan berprestasi tinggi yang

nantinya akan dapat meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang menjelaskan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai sebelum resmi diangkat dalam jabatan struktural (halaman 26-27), nampak terdapat peraturan yang dilanggar dalam rangka promosi pegawai yang tidak sesuai dengan pangkat dan golongan, bahkan tidak sesuai dengan prinsip merit system dan prinsip *the right man on the the right place*.

Informasi ini didukung dengan data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu jumlah pegawai yang diangkat untuk menempati jabatan struktural di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa terdapat 5 orang pejabat pada tahun 2016. Untuk latar belakang pendidikan, ditemukan 2 pejabat dari 5 yang diangkat menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Dengan latar pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan, seseorang dianggap mampu menduduki suatu jabatan tertentu. Karena yang bersangkutan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki ke dalam program dan implementasi kerjanya, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan realita yang terjadi. Dimana, jabatan Kasubag Program Keuangan dan Pelaporan di BKD Kabupaten Minahasa diduduki oleh pegawai yang berlatar pendidikan Sarjana Pertanian. Berbicara tentang bagian program keuangan dan pelaporan sangat tidak sesuai jika ditugaskan pada pegawai yang memiliki latar pendidikan di bidang pertanian. Jabatan tersebut seharusnya diisi oleh

pegawai yang berlatar pendidikan di bidang ekonomi.

Berikutnya, jabatan Kasubid Pendidikan dan Pelatihan. Ditempati oleh pejabat yang berlatar pendidikan sarjana ekonomi. Bidang pendidikan dan pelatihan lebih kompeten jika ditugaskan pada pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tersebut yang sesuai dengan latar pendidikannya. Seharusnya ditugaskan pada pegawai yang berlatar pendidikan Pemerintahan, mengapa ? karena salah satu tugas dari Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah melaksanakan pelatihan Kepemimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah di atas, dan jika disesuaikan dengan data promosi yang di lakukan di BKD pada tahun 2016, untuk golongan kepangkatan, ditemukan satu pejabat yang diangkat tidak berdasarkan syarat jabatan golongan kepangkatan. Dimana untuk jabatan Kasubid yang merupakan pejabat eselon IV/a seharusnya diisi oleh pejabat yang memiliki golongan terendah III/c dan tertinggi III/d. Namun berdasarkan data yang diperoleh, Kasubid Kepangkatan memiliki golongan III/b.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui wawancara langsung di lokasi penelitian serta didukung dengan data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian, apabila dilihat dari segi aturannya promosi pegawai yang seharusnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat-syarat jabatan, juga dengan menerapkan prinsip merit system dan prinsip the right man on the right place, pada implementasinya aturan-aturan dan prinsip tersebut belum sepenuhnya diberlakukan dalam proses promosi pegawai. Terjadi ketimpangan antara apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya. Hal tersebut berindikasi adanya Patologi Birokrasi persepsi dan

gaya manajerial pejabat birokrasi, yaitu perilaku negatif penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam melaksanakan promosi jabatan yang tidak sesuai dengan aturan dan syarat jabatan yang berlaku dilihat dari latar belakang pendidikan serta golongan kepangkatannya.

Promosi pegawai yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan kesulitan bagi perwujudan visi dan misi organisasi sehingga dapat menghambat pembangunan birokrasi yang professional.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya Patologi Birokrasi dalam Promosi Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa adalah faktor spoils system yang lebih mengedepankan pada faktor hubungan kedekatan, antara pegawai yang akan dipromosikan dengan pengambil keputusan. Berkembangnya spoils system dalam promosi pegawai dapat merusak tatanan birokrasi yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa. Faktor spoils system dalam proses promosi pegawai dapat merugikan pejabat lain yang berdedikasi baik, tetapi tidak memiliki aksebilitas untuk berhubungan dengan para pengambil keputusan atau penentu jabatan. Hal ini dapat menimbulkan kesan yang tidak baik serta berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pejabat yang diduga dapat berimplikasi negatif terhadap peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa.

Segala cara dihalalkan untuk mendapatkan dan mempertahankan suatu jabatan. Faktor ini dapat menimbulkan proses penempatan dalam promosi pegawai mengarah pada pelanggaran seperti jabatan yang diduduki oleh pejabat tidak memiliki

pangkat golongan yang sesuai, serta latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Tentu kondisi ini akan menimbulkan terjadinya Nepotisme yang mengakibatkan iklim birokrasi menjadi tidak sehat.

Kesimpulan

1. Persyaratan-persyaratan untuk promosi pegawai dalam jabatan struktural, yaitu golongan kepangkatan serta latar belakang pendidikan belum sepenuhnya diberlakukan, sehingga mengakibatkan terjadinya Patologi dalam promosi Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya Patologi Birokrasi Dalam Promosi Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa adalah faktor hubungan kedekatan (spoils system) antara pejabat yang akan dipromosikan dengan pemberi jabatan yang menyebabkan terjadinya nepotisme.

Saran

1. Kedepannya promosi pegawai harus dilaksanakan sesuai dengan syarat jabatan dan harus berlandaskan pada aturan-aturan yang berlaku. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, maka proses promosi pegawai akan relevan dan terhindar dari Patologi Birokrasi.
2. Harus diakui bahwa praktik spoils system dalam proses promosi pegawai sulit untuk dihindari. Saran penulis, untuk dapat menciptakan iklim birokrasi yang sehat dan untuk memperoleh pegawai yang memiliki kualitas baik yang dapat mendukung kinerja birokrasi sehingga lebih optimal di masa mendatang, maka dalam proses promosi pegawai perlu mengedepankan aspek profesionalitas yang dicerminkan dengan penerapan pendekatan

kompetensi, latar belakang pendidikan, prestasi kerja serta golongan kepangkatan dalam proses promosi pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin, 2009. Birokrasi, Diterjemahkan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta : Tiara Wacana
- Delly Mustafa. 2014. Birokrasi Pemerintahan. ALFABETA, cv. Bandung
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia : Jakarta Bumi Aksara
- Kadarisman. 2013. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia : Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Teruna Made. 2007. Patologi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. (Disertasi). FIA UNIBRAW Malang.
- Said Mass"Ud. 2012. Birokrasi Di Negara Birokratis. UMM Press. Malang
- Siagian, 2009 Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta. PT Rineke Cipta
- , 2014, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Silalahi, U. 2012 Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT Refika Aditama
- Suwatno dan Doni, J. 2014. Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis. Bandung. Alfabeta
- Tedi Sudrajat. 2017. Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan. Jakarta, SINAR GRAFIKA
- Thoha Mitfah, 2008. Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi, Kencana Prenada Media Group. Jakarta

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 1 No. 1 Tahun 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

-----, 2014. Birokrasi dan
Politik di Indonesia, Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada
Winarno Surakhmad. 2010. Pengantar
Penelitian Ilmiah: dasar, metode dan
teknik. TARSITO. Bandung